



RENCANA STRATEGIS LPMP KALIMANTAN TIMUR

2015 – 2019



Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Kalimantan
Timur



Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka
Kelembagaan



Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

KATA PENGANTAR

Sebagai Perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur mempunyai tugas fungsi melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di propinsi. Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan startegis, sasaran program, serta indikator kinerja kegiatan dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan baik Pendidikan dasar maupun menengah menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu rencana strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahun.

Namun demikian, secara periodik rencana strategis ini direviu (sekarang termasuk reviu ke-3) untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan yang diperlukan terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu semua ekosistem pendidikan dalam hal ini satuan pendidikan, dinas pendidikan propinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan stake holder sangat diharapkan berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan positif dan relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan jaman.

Samarinda, Juli 2019
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Kalimantan Timur.



Mohamad Hartono, SH., M.E
NIP 196701101994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii - iii



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1 - 2
B. Landasan Hukum	2 - 3
C. Kondisi Umum.....	3 - 6
D. Potensi Permasalahan.....	7 - 23

BAB. II.VISI, MISI DAN TUJUAN LPMP KALIMANTAN TIMUR

A. Visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.....	25 - 28
B. Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.....	29
C. Tujuan Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.....	30 - 31
D. Sasaran Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.....	32 -35

BAB. III.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	37 - 39
B. Arah Kebijakan dan Strategi.....	40 - 46
C. Kerangka Regulasi	47 - 49

D. Kerangka Kelembagaan.....	49 - 51
------------------------------	---------

BAB.IV.TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja.....	52 - 62
B. Kerangka Pendanaan.....	63 - 66

BAB. V. PENUTUP

Penutup	67 - 68
---------------	---------

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan melalui Permen Dikbud No.22 Tahun 2015 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategis serta Indikator kinerja program dan kegiatan. Berkaitan dengan peraturan tersebut dalam peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, dijelaskan bahwa arah pembangunan untuk RPJMN ke -3 2015 – 2019 Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.Tema pembangunan pendidikan menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 – 2025 diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN).Berikut disajikan tabel tema pembangunan Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel 1.1. Tema Pembangunan Pendidikan

2005 – 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2024
Peningkatan Kapasitas dan modernisasi	Penguatan Pelayanan	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “ **Nawacita** “ berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (2). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional (3) Melakukan revolusi karakter bangsa (4) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan nawa cita dan hak memperoleh pendidikan di jabarkan dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah

No. 17 tahun 2010 dan peraturan turunan lainnya. Berdasarkan Renstra eselon I tahun 2015 – 2019 dalam rangka membangun tatakelola Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya dalam:

1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Meningkatkan partisipasi/pelibatan publik baik dalam proses pengelolaan, kebijakan publik, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.35 tahun 2014 pasal 4 ayat 5 bahwa unit kerja eselon 2 dan UPT menyusun dan menetapkan renstra untuk 5 tahun dengan mengacu pada renstra eselon I, maka LPMP Kalimantan Timur menjabarkan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dalam renstra LPMP yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Sebagai institusi yang berada di tingkat Propinsi, maka dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Timur adalah sesuatu yang sangat penting sehingga keselarasan dan keserasian dalam melaksanakan berbagai program dapat berjalan lancar sesuai dengan target dan tujuan lembaga ini.

B. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

9. Undang- Undang No.23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis K/L) 2015-2019.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.35 tahun 2014 pasal 4 ayat 5 bahwa unit kerja eselon 2 dan UPT menyusun dan menetapkan renstra untuk 5 tahun dengan mengacu pada renstra eselon I
13. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Kondisi Umum

Rencana strategis LPMP KALIMANTAN TIMUR tidak terlepas dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015 – 2019. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah dibantu oleh LPMP sehingga acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran, indikator kinerja, program dan indikator kinerja kegiatan (IKK) serta output renstra dipayungi oleh renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015 – 2019.

Adapun sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah 2015 – 2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPMP adalah

“ Meningkatnya persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar nasional pendidikan “

Maka berdasarkan hal tersebut di atas LPMP Kalimantan Timur sebagai unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai satu sasaran strategis yakni

“ Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan seluruh jenjang pendidikan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur “.

Capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan LPMP KALIMANTAN TIMUR diurutkan sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar ditujukan untuk mendorong meningkatnya rata-rata kualitas layanan pendidikan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang terakreditasi B. Hal tersebut mempunyai dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses retribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D4, proses sertifikasi pendidik dan pengembangan kurikulum yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Upaya memperluas akses layanan pendidikan dilakukan melalui pembangunan sekolah baru (USB), pembangunan SD,SMP satu atap di daerah terpencil, penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan rusak berat. Selain itu melalui program non fisik lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Program Indonesia Pintar.

Dalam rangka peningkatan mutu, terlihat bahwa proses pembelajaran yang terjadi di kelas pada umumnya belum berjalan dengan baik. Sekitar 74 % aktifitas kelas dilakukan oleh guru saja dan sekitar 11 % aktifitas kelas dilakukan bersama oleh guru dan siswa. Hal ini menggambarkan bahwa proses pembelajaran di kelas belum dilakukan secara interaktif yang berdampak pada beberapa hal yaitu kreatifitas siswa tidak bertambah dan daya kritis siswa dalam berpikir serta kemampuan analisis siswa belum terbentuk. Selain proses hasil pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah pun belum menggembirakan. Hasil belajar siswa masih rendah terutama dilihat dari nilai Ujian Nasional.

Sementara itu, pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih bermasalah. Kurikulum dikembangkan dengan membentuk ruang gerak bagi pengembangan minat dan potensi siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi perkembangan global. Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui penguatan penggunaan pendekatan tematik holistik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk karakter pembelajar yang kuat terutama dalam lingkungan komunitas sekolah.

Pengembangan Kurikulum berbasis karakter sebagaimana dikembangkan dalam kurikulum 2013 merupakan penggabungan ideal antara aspek pembelajaran yang menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara holistik integratif. Penguasaan 3 aspek secara integratif tersebut diharapkan dapat menambahkan karakter yang kuat pada siswa sebagai manusia pembelajar, sehingga dapat menambahkan kepekaan terhadap permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar serta mencari solusi secara analitik logik

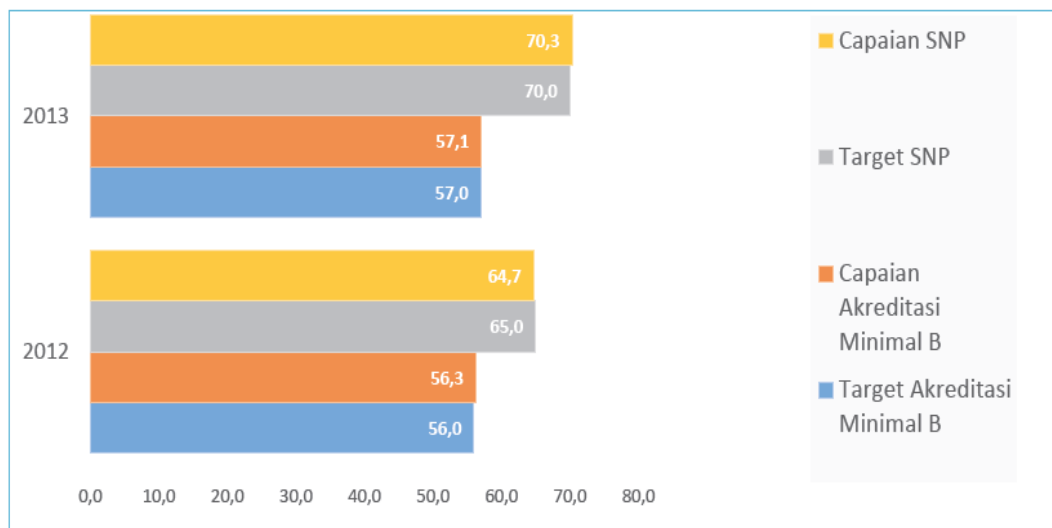
2. Pendidikan Menengah

Pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada 2 hal yaitu meningkat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Untuk itu pemerintah menjamin akses pendidikan menengah seluas – luasnya sehingga diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010-2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB sebesar 68,92% pada tahun 2014. Peningkatan akses pendidikan menengah wajib diselaraskan dengan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan lulusan SMK memiliki keterampilan memadai untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan terampil. Dari segi peningkatan layanan kualitas pendidikan menengah sampai dengan tahun 2013 sebanyak 73,5 % SMA/MA dan 48,2 % kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Pemerintah secara kontinyu berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Hal yang lebih penting untuk diperhatikan berkaitan dengan pendidikan menengah adalah kualitas dan relevansi pendidikan menengah. Kualitas pendidikan menengah dapat dilihat dari angka persentase SMA/SMK/SMLB yang memenuhi akreditasi. Proses akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sementara itu, akreditasi B adalah level akreditasi yang merupakan indikasi

bahwa SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualitas yang baik. Data mengenai target dan pencapaian akreditasi sekolah menengah dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut dimana menunjukkan bahwa lebih dari 70 % SMA/SMK/SMLB telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dan lebih dari 50% SMA/SMK/SMLB telah memiliki kualitas yang baik ditunjukkan oleh akreditasi B.



Grafik 1.1. Persentase SMA/SMK/SMLB Memenuhi SNP dan akreditasi minimal B tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan Dasar dan Menengah diperlukan penerapan kebijakan *good governance* dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan tata kelola pendidikan Dasar dan Menengah antara lain:

- Kesenjangan kapasitas daerah sebagai pelaksana desentralisasi pendidikan. Fleksibilitas dalam membiayai program-program pendidikan menjadi terbatas karena pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang pemanfaatannya didominasi untuk belanja pegawai.
- Keterbatasan peran pemerintah propinsi dalam mendorong peningkatan penjaminan kualitas pendidikan di tingkat daerah.
- Kompleksitas sistem pembiayaan pendidikan karena beragamnya sumber pembiayaan yang harus dikelola secara terpisah serta masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya keuangan sekolah
- Sistem penilaian pendidikan yang dinilai belum cukup baik untuk digunakan sebagai dasar intervensi peningkatan kualitas pendidikan ke depan.
- Koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal.

- f. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) belum optimal kompleksitas model jenis dan penyaluran anggaran oleh Kemenkeu ke daerah.

D. Potensi dan Permasalahan

Indonesia yang pada umumnya dan daerah Kalimantan Timur pada khususnya sebagai negara dan daerah yang luas memiliki potensi, yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan. Perlu dilakukan analisis terhadap potensi yang ada. Tentu juga disamping potensi, tidak dapat dipungkiri pula adanya tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Mengacu kepada Rencana Strategis Kemdikbud tahun 2015 – 2019 dan Rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015 – 2019, beberapa potensi yang menjadi perhatian, adalah

1. Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kalimantan Timur pada khususnya dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan renstra di wilayah Kalimantan Timur. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Beberapa aspek lingkungan strategis yang dimaksud.

- a. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada umumnya dan daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan utara pada khususnya.

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010 – 2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Meski pertumbuhan ekonomi Kaltim secara historis lebih rendah dari pertumbuhan nasional dan provinsi lain yang disebabkan oleh tingkat pengangguran Kaltim lebih tinggi dibanding nasional dan provinsi peersnya, Kaltim terjebak dalam Resource curse dan potensi SDA Kaltim 90 % diekspor masih dalam bentuk mentah. Dari permasalahan ini akan dilakukan simulasi dampak dari perbaikan hambatan pertumbuhan yang telah diidentifikasi sehingga menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal senada dilontarkan oleh para analis asing.

- b. Daya saing Indonesia di mata dunia Internasional
Kalimantan Timur pada khususnya dikatakan tidak mempunyai daya saing tapi mempunyai keberkahan. Kalimantan Timur dapat menjual batu bara dan migas karena daerah ini saja yang memiliki. Dengan keberkahan yang dimiliki itu akan senantiasa mendorong untuk menciptakan daya saing disektor lain. Walau demikian tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara – negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*, Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009 – 2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013 – 2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara- negara maju. Ditinjau dari pencapaian Human Development Indeks (HDI) Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.
- c. Spektrum tenaga kerja Di Kalimantan Timur dan di Indonesia
Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja secara absolut menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat. Berikut ditampilkan tabel perkembangan penduduk usia kerja di propinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.2
Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 dan 2012

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia Kerja					
	Tahun 2008		Jumlah	Tahun 2012		
	Angkatan Kerja	Bukan angkatan kerja		Angkatan Kerja	Bukan Angkatan kerja	Jumlah
Kutai Kartanegara	253.751	136.482	390.233	304.015	167.095	471.110
Kutai Timur	82.972	49.389	132.361	125.523	65.718	191.241
Berau	73.438	40.278	113.716	84.863	46.353	131.216
Penajam Paser Utara	60.131	33.784	93.915	69.643	36.606	106.249
Kota Balikpapan	240.836	127.225	368.061	278.820	147.142	425.962
Kota Samarinda	267.593	167.010	434.603	359.434	199.170	558.604
Kota Bontang	52.069	35.098	87.167	76.422	27.863	104.285

KALIMANTAN 1.030.790 589.266 1.620.056 1.298.720 689.947 1.988667
TIMUR

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Sedangkan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2013, menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65,70 % hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD,SMP), 24,51 % lulusan pendidikan menengah dan 9,79 % lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kelas menengah yang tumbuh kuat dan kebutuhan akan penguasaan teknologi, menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk, inovasi bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

d. Perkembangan kondisi sosial masyarakat di Kalimantan Timur

Posisi geografis Kalimantan Timur sangat strategis karena terletak dibagian timur pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan negara Malaysia (Sabah dan Serawak). Potret ekonomi yang tercipta di Kalimantan Timur secara otomatis mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk jika dikaitkan dengan data kondisi sosial lainnya. Kalimantan Timur memiliki kekayaan SDA hal ini bisa menyerap tenaga kerja misalnya pertambangan, pertanian dan perkebunan. Salah satu masalah besar dalam pembangunan propinsi Kalimantan Timur adalah rendahnya kualitas SDM. Seperti pepatah mengatakan akar dari segala suatu adalah pendidikan. Kurangnya mutu pendidikan disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi penduduk tentang pentingnya keterampilan dan pendidikan. Sehingga pemerintah Kalimantan Timur mencanangkan pendidikan 12 tahun dengan menempuh memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.

e. Capaian Standar Nasional Pendidikan Di Kalimantan Timur

Rendahnya hasil capaian SNP di Satuan Pendidikan yang ada di Propinsi Kalimantan Timur merupakan tantangan besar dari isu strategis dalam melaksanakan tupoksi LPMP KALIMANTAN TIMUR untuk menerapkan dan meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Disamping itu pula hasil pemetaan mutu pendidikan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk penentuan kebijakan, penyusunan program dan alokasi anggaran pendidikan di daerah serta budaya mutu yang belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan

dan penyelenggaraan pendidikan juga termasuk kategori tantangan besar dari isu startegis dalam melaksanakan tupoksi LPMP Kalimantan Timur untuk menerapkan dan meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2016 Di wilayah Kalimantan Timur diperoleh data dari 5 standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan. Sementara standar pembiayaan dan standar sarana prasarana dan PTK belum dapat diperoleh karena kendala-kendala teknis. Tahun 2017 – 2019 akan masuk dalam program 8 Standar Nasional Pendidikan.

Berikut ini disajikan tabel Jumlah sekolah per jenjang di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diperoleh dari data DAPODIK 2017.

Tabel.1.3. Jumlah sekolah per jenjang di Kalimantan Timur 2017

No	Jenjang					
	Status	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Negeri	1.654	427	135	85	9
2	Swasta	209	193	81	134	22
	Jumlah	1.863	620	216	219	31

Sumber : DAPODIK 2017

Tabel.1.4 Jumlah Sekolah sasaran pada kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2016.

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	JUMLAH
1	Samarinda	52	15	8	9	84
2	Bontang	20	7	2	5	34
3	Kutai Timur	81	30	6	1	118
4	Kutai Kartanegara	99	40	15	16	170
5	Balikpapan	54	9	1	2	66

6	Penajam Paser Utara	54	20	3	7	84
7	Paser	50	19	8	3	80
8	Kutai Barat	22	8	10	3	43
9	Mahakam Ulu	-	1	1	-	2
10	Berau	39	18	7	6	70
	Jumlah	471	167	61	52	751

Sumber : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur 2016

Berikut ditampilkan tabel 1.5 tentang Capaian Standar Nasional Pendidikan tahun 2016 di Kalimantan Timur.

Tabel.1.5.Capaian Standar Nasional Pendidikan Tahun 2016 Di Kalimantan Timur.

	Provinsi	SKL	Standar isi	Standar Proses	Standar Penilaian	Standar Pengelolaan	SNP	Capaian
1	Kaltim	5.31	3.49	4.34	2.62	3.91	3.93	Menuju SNP III
	Kab/kota	SKL	Standar isi	Standar Proses	Standar Penilaian	Standar Pengelolaan	SNP	Capaian
1	Samarinda	5.37	3.44	4.44	2.50	3.98	3.94	Menuju SNP III
2	Balikpapan	5.43	3.59	4.52	2.72	4.34	4.11	Menuju SNP III
3	Bontang	5.54	3.71	4.60	2.85	4.07	4.15	Menuju SNP III
4	Kutai Kartanegara	5.28	3.44	4.34	2.58	3.85	3.90	Menuju SNP III
5	Kutai Barat	5.28	3.22	4.19	2.56	3.68	3.79	Menuju SNP III
6	Kutai Timur	5.31	3.69	4.24	2.78	3.94	3.99	Menuju SNP III
7	Mahakam	5.37	3.95	4.79	2.48	4.22	4.16	Menuju

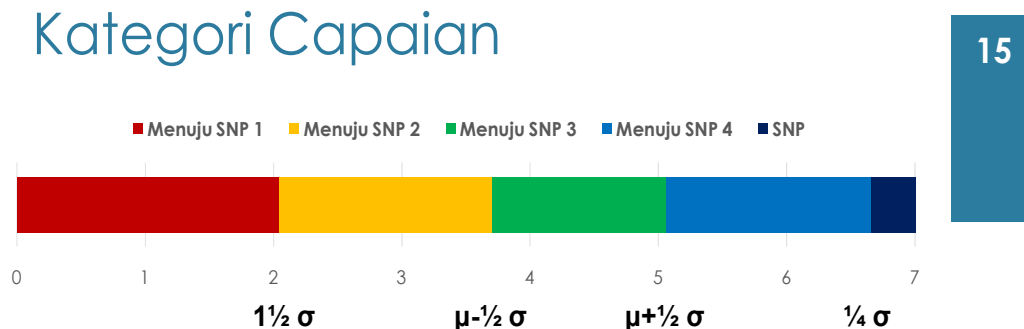
	Ulu							SNP III
8	Penajam Paser Utara	5.29	3.49	4.25	2.56	3.93	3.90	Menuju SNP III
9	Paser	5.25	3.39	4.32	2.52	3.82	3.86	Menuju SNP III
10	Berau	5.23	3.36	4.31	2.52	3.70	3.82	Menuju SNP III

Sumber : Laporan Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur 2016

Penetapan SNP tersebut didasarkan atas kategori capaian SNP dengan menggunakan fungsi standar deviasi sebagai berikut :

Sumber. Laporan Pemetaan Mutu LPMP Kalimantan Timur 2016 .

Kategori Capaian



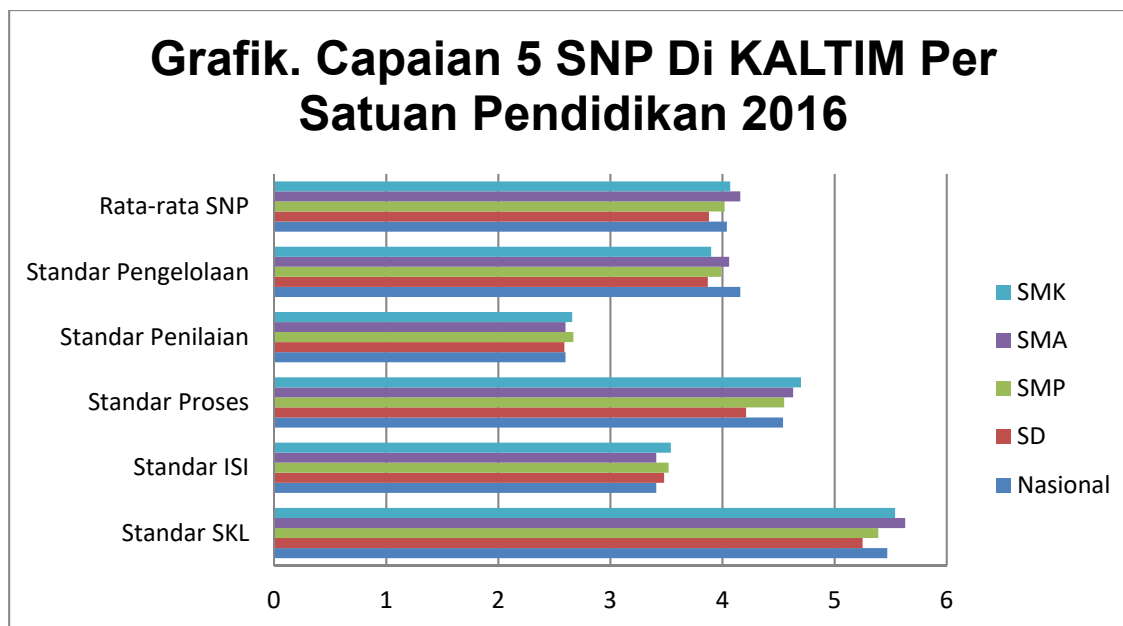
Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0,00	2,04
Menuju SNP 2	2,04	3,70
Menuju SNP 3	3,70	5,06
Menuju SNP 4	5,06	6,66
SNP	6,66	7,00

*hasil simulasi

Rentang kategori capaian SNP ditetapkan dengan menggunakan fungsi standar deviasi*

Berdasarkan tabel 1.5. di atas terlihat bahwa sekolah-sekolah di Kalimantan Timur telah mencapai tahap menuju SNP 3 dari 5 Tahapan yakni menuju SNP 1, menuju SNP 2, menuju SNP 3, menuju SNP 4 dan tahap SNP

Grafik. 1.2 .Capaian 5 Standar Nasional Pendidikan di Kalimantan Timur.



Sumber : Laporan Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur 2016

Dari grafik di atas terlihat capaian masing-masing standar dari 5 standar di Kalimantan Timur..

CAPAIAN PEMETAAN MUTU 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

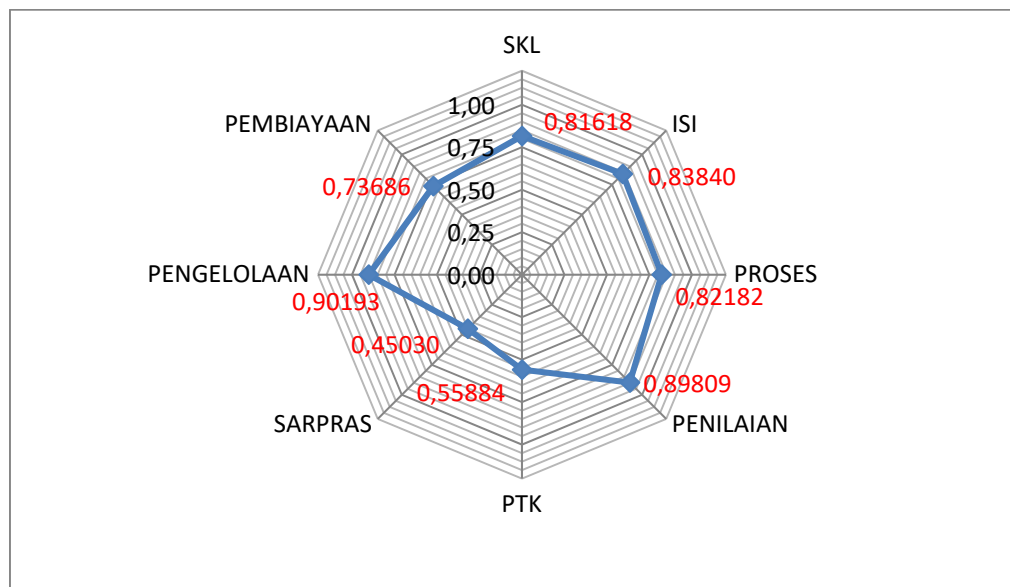
Dari hasil Pengumpulan data Pemetaan Mutu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dengan menggunakan Instrumen berbasis excel dengan nama file “Aplikasi PMP LPMP Kaltim Versi 1.1” telah terkumpul sejumlah 1.212 Sekolah Dasar (SD) yang selanjutnya dilakukan Pengolahan Data. Dengan menggunakan Aplikasi ini maka hasil pengolahan data dikategorikan dalam 5 Tahap yaitu:

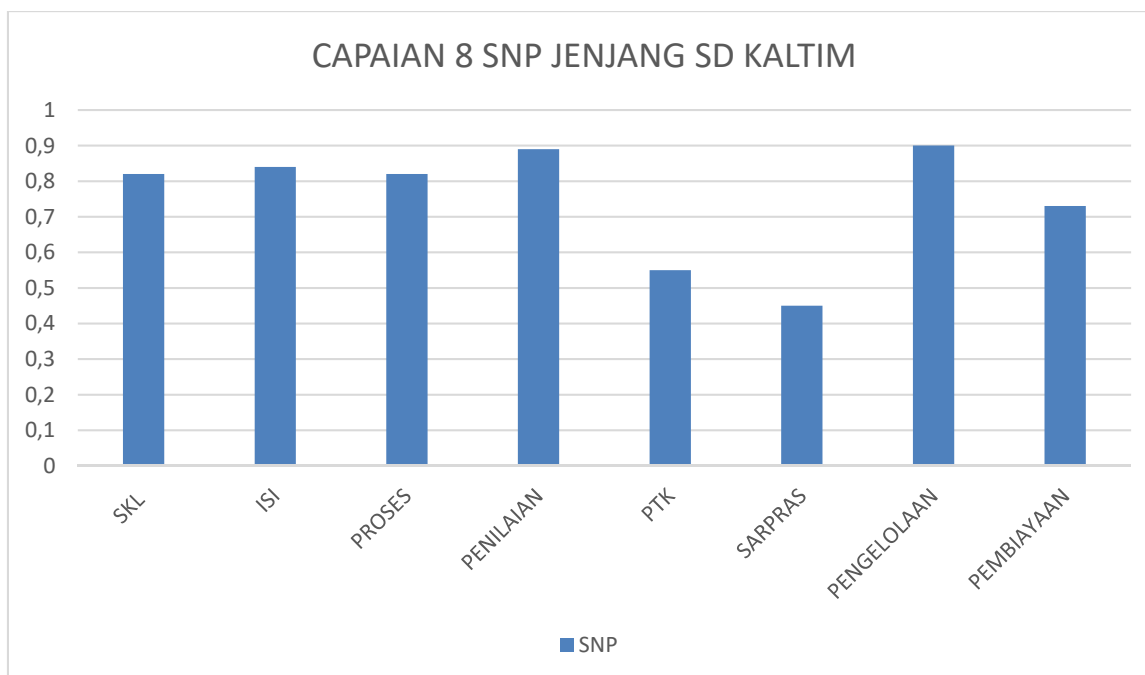
Tabel 1.6. Kategorisasi Hasil Capaian 8 SNP

NO	CAPAIAN	KATEGORI
1	0.000-0.2499	Belum SNP = Tahap 1
2	0.250-0.499	Belum SNP = Tahap 2
3	0.500-0.7499	Belum SNP = Tahap 3
4	0.750-0.9999	Belum SNP = Tahap 4
5	1	SNP

Tabel 1.7. Capaian 8 SNP Provinsi Kaltim Jenjang SD

NO	SNP	CAPAIAN	KATEGORI
1	SKL	0.81618	Belum SNP=Tahap 4
2	ISI	0.83840	Belum SNP=Tahap 4
3	PROSES	0.82182	Belum SNP=Tahap 4
4	PENILAIAN	0.89809	Belum SNP=Tahap 4
5	PTK	0.55884	Belum SNP=Tahap 3
6	SARPRAS	0.45030	Belum SNP=Tahap 2
7	PENGELOLAAN	0.90193	Belum SNP=Tahap 4
8	PEMBIAYAAN	0.73686	Belum SNP=Tahap 3





Grafik 1.3. Capaian 8 SNP di Provinsi Kaltim Jenjang SD

Dari Tabel 1.7. terlihat bahwa semua standar belum mencapai SNP. Dari 8 SNP, 5 Standar masuk dalam kategori Tahap 4 yang terdiri dari SKL, Standar ISI, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan, Standar PTK, dan standar pembiayaan masuk dalam kategori Tahap 3., sedangkan standar sarpras masuk dalam kategori Tahap 2 Untuk dapat mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan perlu dianalisis indikator dan sub indikator dari setiap Standar. Untuk menelusuri masalah-masalah yang menghambat pencapaian 8 Standar Nasional Secara maksimal maka perlu untuk meninjau capaian dari Setiap indikator dan Sub Indikator untuk setiap Standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Dari hasil Pengumpulan data Pemetaan Mutu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dengan menggunakan Instrumen berbasis excel dengan nama file “Aplikasi PMP LPMP Kaltim Versi 1.1” telah terkumpul sejumlah 480 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang selanjutnya dilakukan Pengolahan

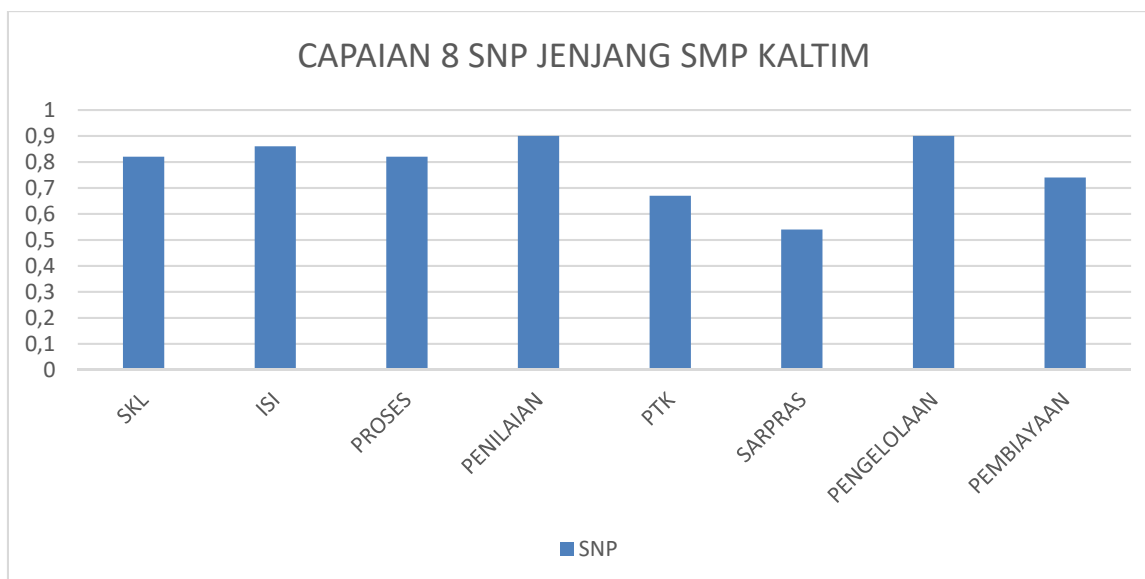
Data. Dengan menggunakan Aplikasi ini maka hasil pengolahan data dikategorikan dalam 5 Tahap yaitu:

Tabel 1.8. Kategorisasi Hasil Capaian 8 SNP

NO	CAPAIAN	KATEGORI
1	0.000-0.2499	Belum SNP = Tahap 1
2	0.250-0.499	Belum SNP = Tahap 2
3	0.500-0.7499	Belum SNP = Tahap 3
4	0.750-0.9999	Belum SNP = Tahap 4
5	1	SNP

Tabel 1.9. Capaian 8 SNP Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMP

NO	SNP	CAPAIAN	KATEGORI
1	SKL	0.82118	Belum SNP=Tahap 4
2	ISI	0.86333	Belum SNP=Tahap 4
3	PROSES	0.82429	Belum SNP=Tahap 4
4	PENILAIAN	0.90313	Belum SNP=Tahap 4
5	PTK	0.67198	Belum SNP=Tahap 3
6	SARPRAS	0.54286	Belum SNP=Tahap 3
7	PENGELOLAAN	0.90062	Belum SNP=Tahap 4
8	PEMBIAYAAN	0.74830	Belum SNP=Tahap 3



Gambar 1.4. Grafik Capaian 8 SNP di Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMP

Dari Tabel 1.9. terlihat bahwa semua standar belum mencapai SNP. Dari 8 SNP, 5 Standar masuk dalam kategori Tahap 4 yang terdiri dari SKL, Standar ISI, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan sedangkan Standar PTK, Standar Sarpras dan standar pembiayaan masuk dalam kategori Tahap 3. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan perlu dianalisis indikator dan sub indikator dari setiap Standar. Untuk menelusuri masalah-masalah yang menghambat pencapaian 8 Standar Nasional Secara maksimal maka perlu untuk meninjau capaian dari Setiap indikator dan Sub Indikator untuk setiap Standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Dari hasil Pengumpulan data Pemetaan Mutu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dengan menggunakan Instrumen berbasis excel dengan nama file "Aplikasi PMP LPMP Kaltim Versi 1.1" telah terkumpul sejumlah 142 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selanjutnya dilakukan Pengolahan Data. Dengan menggunakan Aplikasi ini maka hasil pengolahan data dikategorikan dalam 5 Tahap yaitu:

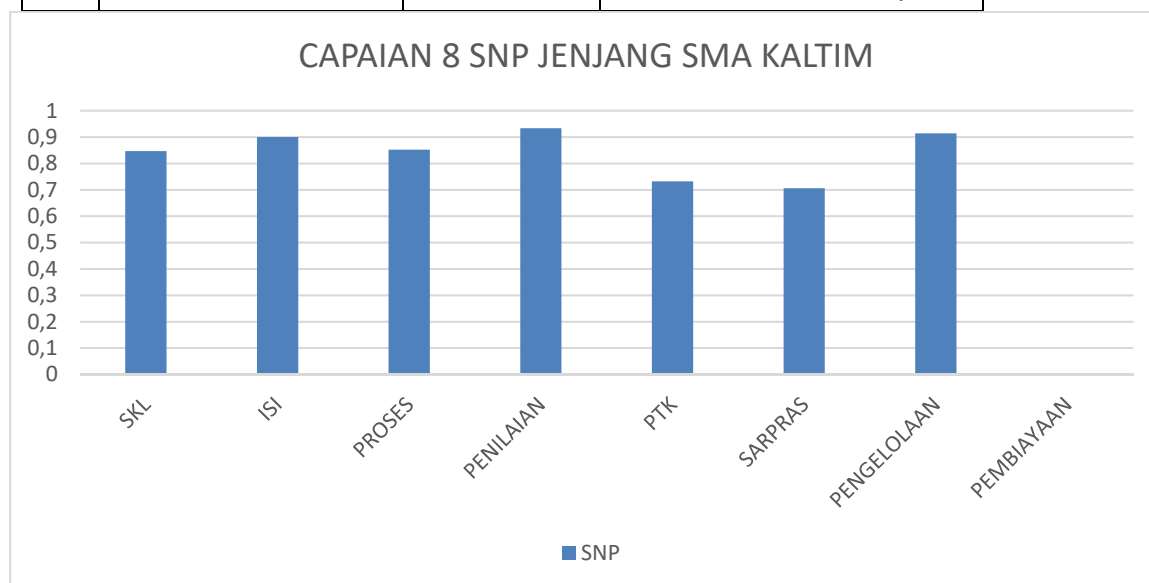
Tabel 1.10. Kategorisasi Hasil Capaian 8 SNP

NO	CAPAIAN	KATEGORI
1	0.000-0.2499	Belum SNP = Tahap 1
2	0.250-0.499	Belum SNP = Tahap 2
3	0.500-0.7499	Belum SNP = Tahap 3
4	0.750-0.9999	Belum SNP = Tahap 4
5	1	SNP

Hasil dari Pengolahan Data terkait Capaian Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jenjang SMA Provinsi Kalimantan Timur disajikan sebagaimana Tabel 1.11 dan Grafik 2.1.

Tabel 1.11. Capaian 8 SNP Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA

NO	SNP	CAPAIAN	KATEGORI
1	SKL	0.84667	Belum SNP=Tahap 4
2	ISI	0.90012	Belum SNP=Tahap 4
3	PROSES	0.85202	Belum SNP=Tahap 4
4	PENILAIAN	0.93303	Belum SNP=Tahap 4
5	PTK	0.73199	Belum SNP=Tahap 3
6	SARPRAS	0.70557	Belum SNP=Tahap 3
7	PENGELOLAAN	0.91414	Belum SNP=Tahap 4
8	PEMBIAYAAN	0.76303	Belum SNP=Tahap 4



Grafik 1.6. Capaian 8 SNP di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMA

Dari Tabel 1.11. terlihat bahwa semua standar belum mencapai SNP. Dari 8 SNP, 6 Standar masuk dalam kategori Tahap 4 yang terdiri dari SKL, Standar ISI, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan, sedangkan Standar PTK dan Standar Sarpras masuk dalam kategori Tahap 3. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan perlu dianalisis indikator dan sub indikator dari setiap Standar. Untuk menelusuri masalah-masalah yang menghambat pencapaian 8 Standar Nasional Secara maksimal maka perlu untuk meninjau capaian dari Setiap indikator dan Sub Indikator untuk setiap Standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Dari hasil Pengumpulan data Pemetaan Mutu tahun 2017 dengan menggunakan Instrumen berbasis excel dengan nama file “Aplikasi PMP LPMP Kaltim Versi 1.1” telah terkumpul sejumlah 178 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang selanjutnya dilakukan Pengolahan Data. Dengan Menggunakan “Aplikasi PMP LPMP Kaltim Versi 1.1”, maka hasil pengolahan data juga dikategorikan kedalam 5 Tahap yaitu:

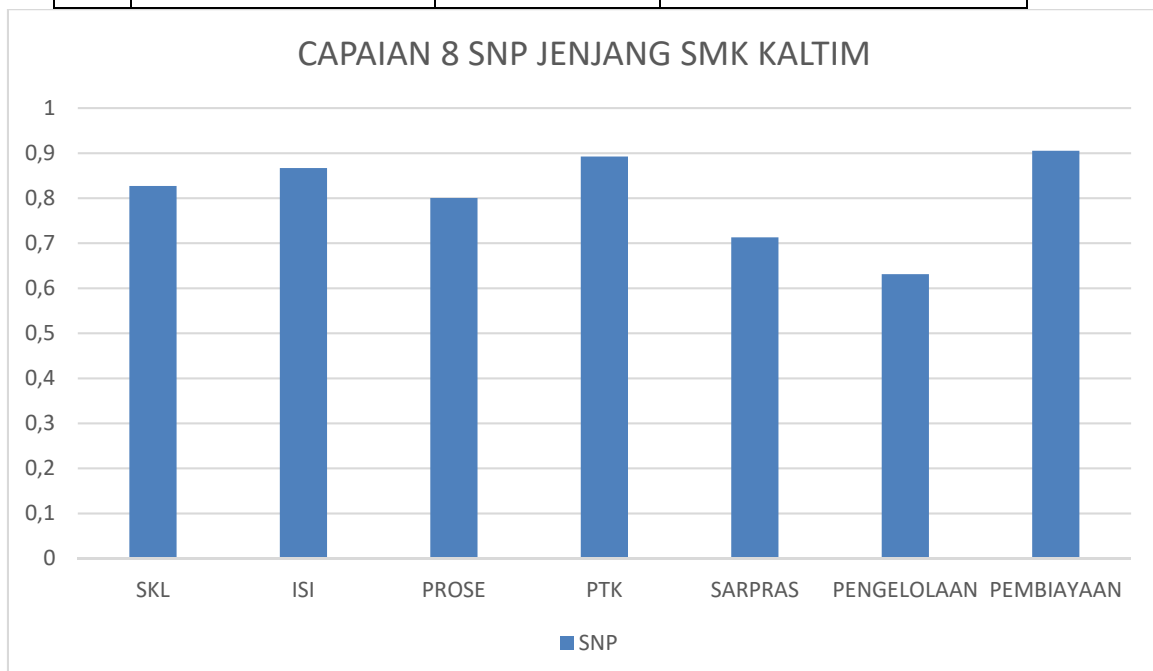
Tabel 1.12. Kategorisasi Hasil Capaian 8 SNP

NO	CAPAIAN	KATEGORI
1	0.000-0.2499	Belum SNP = Tahap 1
2	0.250-0.499	Belum SNP = Tahap 2
3	0.500-0.7499	Belum SNP = Tahap 3
4	0.750-0.9999	Belum SNP = Tahap 4
5	1	SNP

Hasil dari Pengolahan Data terkait Capaian Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jenjang SMK Provinsi Kalimantan Timur disajikan sebagaimana Tabel 1.13 dan Grafik 1.7.

Tabel 1.13. Capaian 8 SNP Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMK

NO	SNP	CAPAIAN	KATEGORI
1	SKL	0.82695	Belum SNP=Tahap 4
2	ISI	0.86676	Belum SNP=Tahap 4
3	PROSES	0.80044	Belum SNP=Tahap 4
4	PENILAIAN	0.89232	Belum SNP=Tahap 4
5	PTK	0.71301	Belum SNP=Tahap 3
6	SARPRAS	0.63103	Belum SNP=Tahap 3
7	PENGELOLAAN	0.90536	Belum SNP=Tahap 4
8	PEMBIAYAAN	0.79524	Belum SNP=Tahap 4

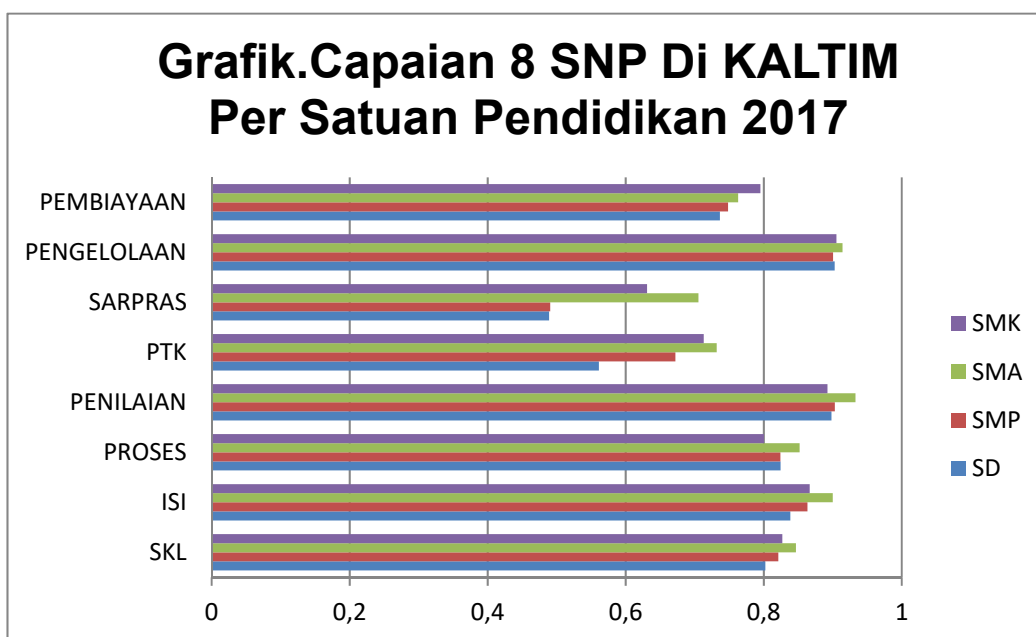


Grafik 1.5. Capaian 8 SNP di Provinsi Kalimantan Timur Jenjang SMK

Dari Tabel 1.13 terlihat bahwa semua standar belum mencapai SNP. Dari 8 SNP, 6 Standar masuk dalam kategori Tahap 4 yang terdiri dari SKL, Standar ISI, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan, sedangkan Standar PTK dan Standar Sarpras masuk dalam kategori Tahap 3. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan perlu dianalisis indikator dan sub indikator dari setiap Standar. Untuk menelusuri masalah-masalah yang menghambat pencapaian 8 Standar Nasional Secara maksimal maka perlu

untuk meninjau capaian dari Setiap indikator dan Sub Indikator untuk setiap Standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

Hasil akhir dari data tersebut setelah diagregasi lagi diperoleh data hasil agregasi capaian SNP Per jenjang untuk Wilayah Kalimantan Timur seperti pada grafik 1.6. berikut ini :



Sumber : "Aplikasi PMP LPMP Kaltim Versi 1.1"

2. Permasalahan dan tantangan pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan Pendidikan dasar dan menengah adalah :

- Bagaimana indikator pendidikan dari misi 2 Kemdikbud (mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan) dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan.
- Bagaimana indikator pendidikan dari misi 3 Kemdikbud (mewujudkan pembelajaran bermutu yang terdiri dari 3 mutu yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu dilihat dari guru, siswa dan prasarana dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan
- Bagaimana keberhasilan program pembangunan pendidikan yang digambarkan dari indikator pendidikan misi 2 dan 3 berdasarkan renstra pendidikan 2015 – 2019

Sesuai dengan misi pendidikan dan kebudayaan M1 sampai M5 maka layanan pendidikan hanya difokuskan pada M2 dan M3. Oleh karena itu program pembangunan pendidikan yang dimaksud di sini adalah semua program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan M2 yaitu akses yang

meluas, merata dan berkeadilan serta M3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu dari segi guru, siswa dan prasarana.

Mewujudkan M2 dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan serta bagi wilayah terdepan/terluar, terpencil dan tertinggal (3T). Mewujudkan M3 dilaksanakan dengan meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan dan memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman dan penguatan praktik baik dan inovasi.

Berdasarkan M2 dan M3 Maka untuk menggambarkan ukuran – ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi maka diperlukan tujuan strategis kemdikbud 2015 – 2019. M2 dan M3 pada tujuan strategis 3 dan tujuan strategis 4. Tujuan strategis 3 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah dilaksanakan selama ini, namun upaya lebih lanjut akan dilakukan mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar propinsi dan kabupaten/kota. Perhatian lebih besar diberikan pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses PAUD perlu ditingkatkan 5 tahun kedepan karena PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dalam menyiapkan memasuki jenjang pendidikan dasar. Selain itu meskipun penuntasan wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan namun peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga.

Tujuan strategis 4 adalah peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran dan berorientasi pada pembentuk karakter. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam 5 tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus serta orang dewasa. Dalam mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam 5 tahun ke depan yang difokuskan pada pembentukan karakter siswa dan telah dirintis LPMP KALIMANTAN TIMUR sejak tahun 2013 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan kurikulum 2013 pada setiap jenjang pendidikan. Inti dari pelaksanaan kurikulum 2013 adalah pengintegrasian karakter pada setiap

mata pelajaran. Namun hasil yang diperoleh belum dapat diuji secara signifikan mengenai keberhasilan kurikulum ini secara Nasional. Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih dalam mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh pelibatan siswa dikelas secara interaktif, sehingga mendorong kreatifitas siswa, daya kritis dalam berpikir, dan kemampuan analisis. Peningkatan mutu pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan erat dengan pengembangan penerapan kurikulum secara baik, evaluasi secara terus menerus atas pelaksanaan kurikulum, sehingga menghasilkan kurikulum yang baik. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan keterampilan tepat guna kepada penduduk buata aksara usia 15 – 59 tahun, pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah.

BAB

2

VISI, MISI, DAN TUJUAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR



Salah satu pelaksanaan kegiatan LPMP Kalimantan Timur di daerah dalam menunjang Output Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi berdasarkan 8 SNP.

A. Visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

Berdasarkan rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 – 2025, Visi pembangunan pendidikan 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna Insan Indonesia Cerdas meliputi 4 cerdas yaitu cerdas spritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis. Makna dari masing- masing kecerdasan tersebut adalah :

1. Cerdas spritual bermakna Insan yang mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, dan ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;
2. Cerdas emosional dan sosial bermakna Insan yang mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai- nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam : (a). Membina dan memupuk hubungan timbal balik (b). Berdemokrasi (c). Berempati dan bersimpati, (d). Menjunjung tinggi hak asasi manusia, (e). Memupuk rasa ceria dan percaya diri, (f). Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara (g). Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
3. Cerdas intelektual bermakna insan yang berkualitas diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.
4. Cerdas kinestetis bermakna insan yang beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar berdaya tahan, sigap, terampil, trengginas. Beraktualisasi insan yang adiraga.

Sedangkan kompetitif bermakna Insan yang mempunyai sifat dan perilaku sebagai berikut :

- a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan
- b. Bersemangat juang tinggi
- c. Jujur
- d. Mandiri
- e. Pantang Menyerah
- f. Pembangunan dan Pembinaan Jejaring

- g. Bersahabat dengan perubahan
- h. Inovatif dan menjadi agen perubahan
- i. Produktif
- j. Sadar mutu
- k. Berorientasi global
- l. Pembelajaran sepanjang hayat
- m. Menjadi rahmat bagi semesta alam

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis 2015 – 2019, yaitu “ **Terbentuknya Insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong**”. Mengacu kepada Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu “ **Terbentuknya Insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong**”. Dalam menjalankan Penjaminan Mutu Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau dengan kata lain bahwa LPMP sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka LPMP Kalimantan Timur menetapkan visi yang juga mengacu pada renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yakni “**Terbentuknya Insan serta ekosistem mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kalimantan Timur yang berkarakter dengan olah beaya menjunjung mutu.**”

Ada beberapa hal yang harus lebih diperjelas dari visi ini, yakni makna ekosistem dan gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Ekosistem dimaksud dalam visi adalah sebagai berikut :

1. Sekolah yang kondusif

Suasana yang kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan yang saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung yang lain adalah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orang tua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti, membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang berperan penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang –undang yang mengaturnya.

Pengalaman negara- negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan yang finansial peran industri yang penting adalah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar.

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan dapat menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerjasama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan ke dua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (Keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 berbunyi : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang –kurangnya 20 % dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.”

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota antar daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih dari pada waktu sebelumnya.

Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Makna gotong royong merupakan salah satu ciri khas Bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela merasa turut berkepentingan serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

B. Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

Sebagaimana misi yang diemban oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menetapkan 5 misi sebagai berikut :

Tabel.2.1. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Misi
M1	Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
M2	Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
M3	Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
M4	Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
M5	Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik

Dalam rangka mencapai misi ini dengan berdasar pada misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut maka ada 4 (empat) misi yang harus diemban oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur sebagaimana misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu :

- (1). Mewujudkan pelaku pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu dan berkarakter

(2). Meningkatkan tata kelola dan efektifitas birokrasi lembaga dan pelibatan publik

(3). Mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kalimantan Timur

C. Tujuan Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.

Tujuan startegis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2015 – 2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan startegis tersebut adalah:

Tabel.2.2. Tujuan Strategis LPMP Kalimantan Timur 2015 - 2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran dan pemberdayaan SDM yang berorientasi pada pembentukan karakter.
T.2	Peningkatan sistem tatakelola yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel

Tujuan strategis ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat/WNI, tanpa memandang status sosial ekonomi dan budaya, etnis,ras, agama gender ataupun faktor geografis serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar tercapai kesejahteraan yang adil dan merata. Penjabaran tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam 5 tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan Dasar dan Menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreatifitas siswa, daya kritis dalam berpikir, dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes Internasional. Sebagai contoh hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Disamping test yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik.

Evaluasi yang terus menerus akan pelaksanaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak dan mengembangkan keperibadian peserta didik, dan hal ini sudah diterapkan dalam Pelaksanaan dan penerapan Kurikulum pendidikan yang dikenal dengan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dalam kaitannya pendidikan di sekolah adalah kurikulum yang pada intinya mengintegrasikan Penguatan pendidikan Karakter ke dalam setiap mata pelajaran. Sementara itu pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

2. Peningkatan Sistem tata kelola yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar (a). Mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b).tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (Baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi kemdikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset dan bukti lapangan. Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan.

Oleh karena itu perlu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), anggaran pengembangan sarana dan prasarana melalui DAK akan diarahkan pada

ketersediaan sarana prasarana yang lengkap baik mutu pendidikan, dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan.

D. Sasaran Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis program yang harus dicapai tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut, sehingga menjadi target yang harus dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah selama 5 tahun ke depan. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP). Adapun Sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada kaitannya dengan program Penjaminan Mutu Pendidikan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan strategis peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter.

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar pendidikan nasional; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovatif. Untuk melaksanakan tujuan strategis ini diperlukan beberapa sasaran program antara lain :

- a. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
 - b. Tersedianya sekolah model di setiap kabupaten/kota
 - c. Meningkatnya kualitas satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP).
2. Tujuan strategis peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel.

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data riset, dan bukti lapangan, membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien. Performance atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Selain perlunya kinerja yang baik, maka ketercapaian tujuan strategis ini harus di dukung oleh :

- a. Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru
- b. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2015 – 2019, dalam mencapai nilai LAKIP tersebut maka LPMP KALIMANTAN TIMUR juga berupaya dapat berkontribusi terhadap nilai capaian itu.

Tabel.2.3. Kaitan Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Dirjen Dikdasmen dengan Program Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP KALTIM.

No	Tujuan Strategis	Sasaran Program	IKP
1	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.	Peningkatan kualitas pembelajaran	<p>Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebesar 40 %</p> <p>Persentase SMP yang memiliki Sarana dan prasarana sesuai SNP sebesar 53 %</p> <p>Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 61,49 %</p>

No	Tujuan Strategis	Sasaran Program	IKP
		<p>Tersedianya sekolah model disetiap kabupaten/kota</p> <p>Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standart nasional pendidikan (SNP)</p>	<p>Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 75,37 %</p> <p>Persentase kabupaten/kota yang memiliki sekolah model sebesar 100 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan yang meningkat efektivitas berdasarkan SNP sebesar 95%</p>
2.	Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	Tersedianya data Pendidikan Dasar dan Menengah yang akurat, berkelanjutan, dan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Program	IKP
		Dan tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik	Terbarukan sebanyak 95 % Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen dan LAKIP LPMP Kalimantan Timur sebesar 80 (baik) pada tahun 2019.

BAB

3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN



Salah satu pelaksanaan kegiatan LPMP Kalimantan Timur di daerah dalam menunjang output Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015 – 2019 di bagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan startegi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2015 – 2019, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di masa mendatang situasi perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan startegi nasional ke depan. Arah kebijakan dan staretgi nasional dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan dan kondisi lingkungan strategis.

Berdasarkan RPJMN ke-3 yang sesuai amanat RPJP 2005 – 2025 dinyatakan bahwa prioritas dan program aksi bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas :

1. Peningkatan akses pendidikan

Tantangan dalam pembangunan akses pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Merupakan kewajiban dan tugas dari Ditjen Dikdasmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus serta orang dewasa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah di dukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas

secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes Internasional. Sebagai contoh hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus menerus atas pelaksanaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan. Sesuai dengan perbaikan dan revisi kurikulum 2013 tahun 2017 adalah pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter di dalam pembelajaran, pengintegrasian literasi keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (*Creatif, critical thinking, communicative dan collaborative*) serta mengintegrasikan HOTS (*Higher Order Thinking Skill*). Pengintegrasian dapat berupa : pepaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu pendidikan kewargaan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

3. Menciptakan Tata kelola

Tantangan utama pembangunan tata kelola adalah menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

Dalam RPJMN 2015 – 2019 yang menjadi sasaran pokok pembangunan pendidikan dasar dan menengah adalah memfokuskan pada delapan sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel. 3.1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun	8,8 tahun
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	96,1 %
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2 %
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6 %
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0 %
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20 % penduduk termiskin dan 20 % penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20 % penduduk termiskin dan 20 % penduduk terkaya	0,60

Berdasarkan Nawacita ke-5, untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia, dalam bidang pendidikan antara lain, di dukung melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Dengan Program PIP diharapkan dapat menjamin akses memperoleh pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam PIP melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dalam RPJMN 2015 – 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel.3.2.sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Sasaran PIP melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dalam RPJMN 2015 – 2019.

Indikator Kinerja	Satuan	2014	2019
1. Sasaran Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket Angka Partisipasi Murni/APM SD/MI			
Angka partisipasi Murni/APM SD/MI	%	91,3	94,8
Angka partisipasi Kasar(APK) SD/MISD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni/APM SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka partisipasi Kasar/APK SMP/MTs,paket B	%	101,6	106,9
2. Sasaran Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni (APM)	%	55,3	67,5

SMA/MA/SMK			
Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C	%	79,2	91,6

1. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan ;
2. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
3. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif.
4. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di Industri
5. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal serta,
6. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar daerah.
7. Tersusunnya peraturan perundangan terkait program wajib belajar 12 tahun.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur diturunkan dari arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan strategi nasional. Dengan mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar dan menengah, maka LPMP Kalimantan Timur harus menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang ada di atasnya yakni sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara arah kebijakan dan Strategi Ditjen Pendidikan Dasar dan menengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.

Tabel 3.3. Kaitan arah Kebijakan dan Strategi Dirjen Dikdasmen dan LPMP Kaltim

Isu Strategis	Arah kebijakan	Strategi
1. Peningkatan Pendidikan Kewargaan	Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan serta tanggungjawab sebagai warga negara yang baik (<i>good citizen</i>)	Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKn, IPS, sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, Bahasa Indonesia)
2. Peningkatan Pendidikan karakter	Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi	Penguatan dan pemberdayaan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan untuk

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik.	memperkuat nilai-nilai moral , akhlak dan kepribadian, peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Pengembangan kurikulum jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai nilai

	<p>Membangun gerakan budaya mutu sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa</p>	<p>moralitas dan etika sosial.</p> <p>Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran untuk mencegah perilaku yang menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral</p> <p>Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna</p>
--	--	--

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran	<p>Memperkuat jaminan kualitas (<i>qualiti assurance</i>) pelayanan pendidikan</p> <p>Mengembangkan kurikulum</p>	<p>Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang Pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>Monitoring Peningkatan kapasitas pemerintah kab/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan dasar Menengah</p> <p>Monitoring Pemenuhan standar pendidikan nasional (SNP) secara bertahap jenjang pendidikan Dasar dan Menengah</p>

		<p>Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan</p> <p>Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas melalui kegiatan pelatihan dan penguatan.</p> <p>Penguatan kerjasama antara guru kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk mendukung efektifitas pembelajaran.</p> <p>Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah.</p>
--	--	---

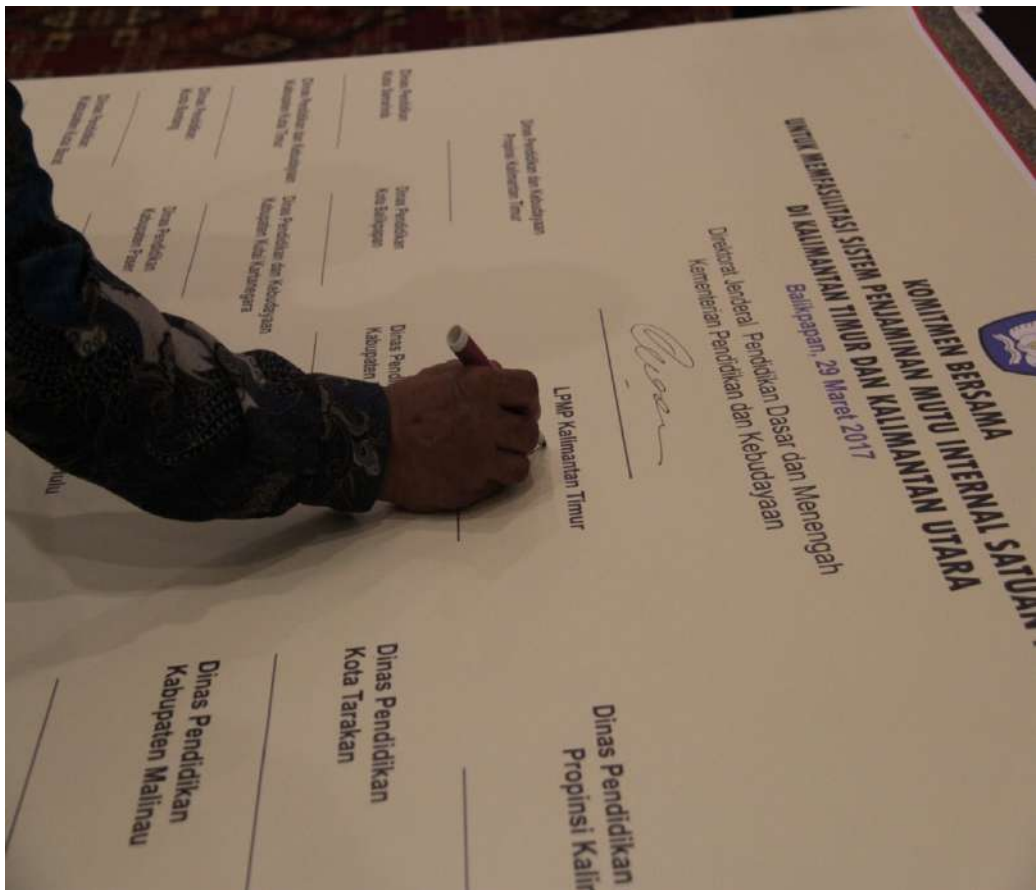
Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>Penyediaan dukungan materi melalui pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.</p> <p>Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika sains dan literasi baik dengan melalui ujian nasional maupun melalui ujian Internasional.</p> <p>Peningkatan kualitas pembelajaran matematika</p>

<p>4. Peningkatan Tata kelola pendidikan</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pendidikan dalam rangka desentralisasi</p>	<p>sains dan literasi dengan melalui pertimbangan kesetaraan hasil belajar dengan jenis kelamin.</p> <p>Peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya melalui bidang sains, olahraga dan seni.</p> <p>Penguatan kapasitas melalui pemerintah propinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan pendidikan</p> <p>Penguatan melalui kemitraan antara pusat dengan dinas Pendidikan propinsi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota</p>
--	--	--

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
<p>5. Peningkatan efisiensi</p>	<p>Memperkuat sistem informasi pendidikan</p> <p>Meningkatkan efisiensi</p>	<p>Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi melalui :</p> <p>Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan.</p> <p>Penguatan sistem informasi melalui pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan.</p>

<p>pembiayaan pendidikan</p>	<p>pemanfaatan anggaran pendidikan</p>	<p>Memperkuat sistem penggunaan dan laporan pertanggungjawaban melalui penyerapan anggaran.</p> <p>Memperkuat sistem perencanaan pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan/ pembangunan kapasitas propinsi /kabupaten/kota</p>
------------------------------	--	--

Selaras dengan isu strategis secara global di atas maka isu strategis yang dihadapi LPMP Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan adalah masih rendahnya hasil capaian SNP pada Satuan Pendidikan. Oleh sebab itu arah kebijakan yang diambil sejalan dengan arah kebijakan dari PUSAT yakni arah kebijakan memperkuat jaminan kualitas (*qualiti assurance*) pelayanan pendidikan dengan menempuh strategi yang dijalankan oleh PUSAT yakni monitoring pemenuhan SNP secara bertahap pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.



Gambar. 3.1. Komitmen Bersama membangun sinergi pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam mencapai SNP.

Untuk melaksanakan strategi diatas diperlukan berbagai program yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental melalui peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang dengan mengacu pada SNP
2. Peningkatan jaminan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah melalui penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun,
3. Peningkatan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat melalui manajemen berbasis sekolah.

Perincian sasaran strategis dan program serta Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada kaitannya dengan program

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel.3.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program LPMP KALTIM

No	Sasaran Strategis	IKP
1	Peningkatan kualitas pembelajaran	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP
2.	Jumlah sekolah model di setiap kabupaten dan kota	Persentase jumlah sekolah model di setiap kabupaten/kota.
3.	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 standar nasional pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP
4.	Tata kelola Ditjen Pendidikan dasar dan menengah yang baik dan tata kelola LPMP Kaltim yang baik	Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen dan LPMP KALTIM sebesar 80 (baik) pada tahun 2019. Data pendidikan Dasar dan Menengah akurat,berkelanjutan dan terbarukan.

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN, rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mengawak tercapainya arah kebijakan strategi

dan sasaran tahun 2015 – 2019. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian strategis ini dijelaskan seperti pada tabel 3.5. berikut :

Tabel.3.5.Kerangka regulasi dalam mendukung capaian strategis

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi, eksisting.kaajian, dan penelitian
1	Penyempurnaan/ Revisi UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal2 yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta menambahkan substansi yang belum diakomodasi (wajib belajar 12 tahun)
2	Peraturan perundangan tentang institusionalisasi komite/dewan pendidikan nasional	Memperjelas fungsi lembaga komite dewan pendidikan nasional dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
3.	Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015 – 2019 (Seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan)	Memudahkan dalam mengkoordinasikan kebijakan program kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan fungsi pendidikan

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi, eksisting.kaajian, dan penelitian
		serta kesepakatan indikator sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan diacapai dalam kurun waktu 2015 – 2019
4	Penyiapan peraturan	Memperjelas kewenangan dan

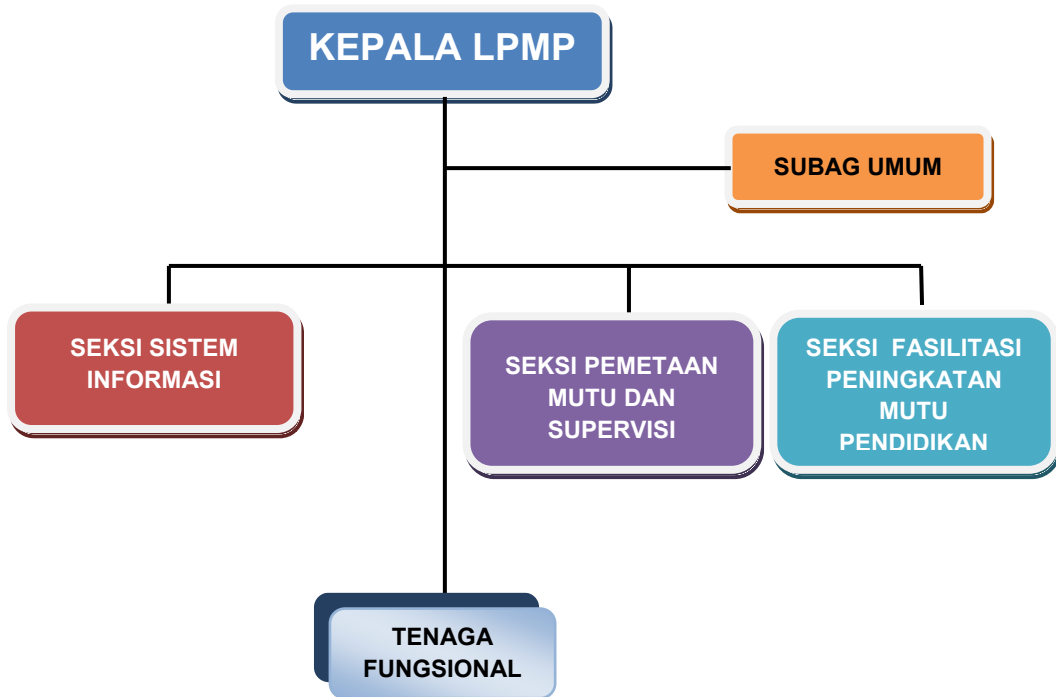
	perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan tingkat pusat,propinsi,kabupaten dan kota	tanggungjawab serta tugas dan fungsi dewan pendidikan tingkat pusat,provinsi,kabupaten dan kota
5	Rencana perubahan terhadap PP No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar	Adanya program pemerintah untukmeningkatkan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun mengharuskan dilakukannya perubahan PP No 47 tahun 2008.

Kerangka regulasi dalam renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan renstra Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur ditujukan untuk mengimplementasikan kebijakan terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantapkan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Kerangka disusun dengan tujuan antara lain (1). Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang – bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi visi/misi kemendikbud

**Struktur Organisasi LPMP
(Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2015)**



Gambar.3.2. Struktur Organisasi LPMP Kalimantan Timur

(2).membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur dalam melaksanakan program-programnya. (3).Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Berdasarkan Kemenpan No.B/243/M.Pan/I/2007,tanggal 31 januari 2007 tentang revitalisasi PPPG menjadi PPPPTK dan BPG menjadi LPMP berdasarkan Kepmen 7/o/2007 dan juga Kepmen 044/o/2004 dimana LPMP merupakan lembaga pusat yang berada di daerah yaitu provinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pusat di daerah serta berdasarkan Permendiknas No.8 tahun 2007 disebutkan tugas pokok LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di propinsi berdasarkan standar nasional pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Permendiknas RI No.63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Bab I, Pasal 1, ayat 15 menyatakan lembaga penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai

standar pelayanan minimal sampai dengan mencapai dan/atau melampaui standar nasional pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah sebagai pelaksana RPJMN 2015 -2019 maka LPMP Kalimantan Timur menyusun renstra yang akan menjadi pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan efektif, efisien dan akuntabel guna tercapainya sasaran pembangunan pendidikan nasional.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi makin efektif dan akuntabel akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga-lembaga pemerintah yang berkualitas, yang ditandai dengan (1).fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi dan benturan kewenangan.(2).aturan main dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien transparan dan sinergis (*interconnected governance system*), dan (3) profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara yang tinggi sehingga mampu melaksanakan visi,misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis lembaganya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan efektif diantara berbagai instansi yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah dengan memperhatikan : (1) kebijakan pembangunan (2). Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (3). Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern, serta (4).Transparansi, efektivitas dan efisiensi sesuai ketersediaan anggaran negara.

Dari berbagai upaya tersebut diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel, yang dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu melalui :

1. Pembentukan lembaga independen yang merumuskan dan melaksanakan sistem penilaian pendidikan.
2. Peningkatan peran teknologi dan informasi (TI) dalam pendidikan termasuk dalam pengembangan ilmu TI, penyediaan materi bahan ajar, penguatan metode pembelajaran yang efektif dan penguatan pengelolaan pendidikan.
3. Pembentukan dewan pendidikan di tingkat propinsi
4. Pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional
5. Meningkatkan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan.
6. Memperkuat sistem informasi pendidikan disemua tingkatan pemerintahan.

BAB

4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



Salah satu gambar pemenuhan Target Kinerja pelaksanaan kurikulum 2013 tahun 2017 terpenuhinya 1277 sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 di semua jenjang Pendidikan.

Target kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 8 (delapan) sasaran pokok program untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari diantara 8 (delapan) sasaran pokok program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka LPMP Kalimantan Timur menetapkan 1 (satu) sasaran pokok program, **“Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Seluruh Jenjang dan Jenis Pendidikan”**. Satu (1) sasaran pokok program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur mencakup 4 sasaran pokok program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang sangat berhubungan erat. Berikut ditampilkan Tabel hubungan Sasaran Pokok Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Sasaran Pokok Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.

Tabel.4.1. Hubungan Sasaran Pokok Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Sasaran Pokok Program dan Indikator Kinerja Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.

No	Tujuan Strategi Dirjen Dikdasmen	Sasaran Program Dirjen Dikdasmen	Tujuan Strategi LPMP KALTIM	Sasaran Program LPMP KALTIM
1.	Peningkatan Mutu dan Relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter	1. Peningkatan kualitas pembelajaran 2. Tersedianya sekolah model di setiap kab/kota 3. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan melalui 8 SNP	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pemberdayaan SDM	1. Peningkatan layanan pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Seluruh Jenjang dan jenis Pendidikan. Mencakup : A. Peningkatan kualitas pembelajaran B. Tersedianya Sekolah model di setiap kab./kota C. Meningkatnya kualitas sistem pendidikan melalui

No	Tujuan Strategi Dirjen Dikdasmen	Sasaran Program Dirjen Dikdasmen	Tujuan Strategi LPMP KALTIM	Sasaran Program LPMP KALTIM	peningkatan 8 SNP
2.	Peningkatan sistem tata kelola yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	Peningkatan sistem tata kelola yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel	Tata kelola LPMP KALIMANTAN TIMUR yang baik	

Tabel.4.2 Hubungan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

No	IKP Dirjen Dikdasmen	IKK LPMP KALIMANTAN TIMUR
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebesar 40 % 2. Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP sebesar 53 % 3. Persentase Kab/kota yang memiliki sekolah model sebesar 100 % 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi dan disupervisi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan. <ol style="list-style-type: none"> A. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP sebesar 40% B. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP sebesar 40% C. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP sebesar 40%

No	IKP Dirjen Dikdasmen	IKK LPMP KALIMANTAN TIMUR
	<p>4. Persentase satuan pendidikan yang meningkat efektifitas berdasar SNP sebesar 95 %</p>	<p>D. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP sebesar 40 %</p> <p>E. Persentase SD yang melaksanakan kurikulum 2013 sebesar 35 %</p> <p>F. Persentase SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 sebesar 35 %</p> <p>G. Persentase SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 sebesar 35 %</p> <p>H. Persentase SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 sebesar 35 %</p> <p>2. Satuan Pendidikan Yang Telah dipetakan Mutu Pendidikannya</p> <p>a. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya sebesar 100% (Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Sebesar 40 %</p> <p>b. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya sebesar 100% (Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Sebesar 60 %</p>

No	IKP Dirjen Dikdasmen	IKK LPMP KALIMANTAN TIMUR
		<p>c. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya sebesar 100% (Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Sebesar 60 %</p> <p>d. Persentase SMK yang telah</p>

2	<p>a. Tersedianya data pendidikan Dasar dan Menengah yang akurat, berkelanjutan, dan terbaru sebanyak 95 %</p> <p>b. Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019</p>	<p>dipetakan mutunya sebesar 80% (Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Sebesar 45 %</p> <p>3. a. Tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru sebanyak 95%</p> <p>b. Nilai minimal LAKIP LPMP KALTIM sebesar 80 (baik) pada tahun 2019</p>
---	--	--

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran Rencana Kinerja LPMP KALIMANTAN TIMUR periode 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk seluruh Jenjang dan jenis Pendidikan yang terdiri atas 2 IKK yaitu :

- 1.1. Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya.

Tabel.4.3. Target pemetaan mutu dan peningkatan indeks efektifitas sekolah tahun 2015 – 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemetaan mutu SD	%	90,15	100	100	100	100
2.	Peningkatan indeks efektifitas SD	%	5	15	40	75	95
3	Pemetaan mutu SMP	%	71,49	100	100	100	100

4	Peningkatan indeks efektifitas SMP	%	20	35	60	80	95
5	Pemetaan mutu SMA	%	71,49	100	100	100	100
6	Peningkatan indeks efektifitas SMA	%	20	35	60	80	95
7	Pemetaan mutu SMK	%	59,60	65	80	90	100
8	Peningkatan indeks efektifitas SMK	%	10	25	45	70	95
9	Pembinaan Dewan Pendidikan	%	10	350	350	350	350

1.2. Satuan Pendidikan Yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP.

Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP dapat dilihat dari tabel 10 berikut :

Tabel.4.4. Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP

No	Target	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP	14	29	52	76	95

Tabel.4.5.Target Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP per jenjang Pendidikan

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SD	%	16,8	25	40	60	80
2.	Supervisi						

	dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMP	%	16,8	25	40	60	80
--	--	---	------	----	----	----	----

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
3.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMA	%	16,8	25	40	60	80
4.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMK	%	16,8	25	40	60	80

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Adapun 8 standar yang dikembangkan adalah seperti berikut :

1. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan.

2. Standar Proses Pendidikan

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi pendidikan dasar merupakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pada pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan yang minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah, dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi kepribadian
- c. Kompetensi profesional
- d. Kompetensi Sosial

5. Standar sarana dan prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat

berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur, dan berkelanjutan.

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan terdiri atas :

- a). Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- b). Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, menyusun program kerja yang memprioritaskan pada : wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat; peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, terhadap kebutuhan masyarakat; dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan.
- c). Standar pengelolaan oleh pemerintah, menyusun program kerja yang memprioritaskan pada : wajib belajar; peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara; penjaminan mutu satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah, peningkatan status guru sebagai profesi; peningkatan mutu dosen; standarisasi pendidikan, akreditasi pendidikan; peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global; pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan nasional.

7. Standar pembiayaan pendidikan; pembiayaan pendidikan terdiri atas :

- a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air,

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8. Standar penilaian pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan dasar terdiri atas : penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pada output Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP outcome-nya berupa sekolah rujukan/sekolah model di setiap kabupaten/kota. Pembangunan sekolah rujukan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah. Sejumlah kriteria agar suatu satuan pendidikan dapat diangkat statusnya menjadi sekolah rujukan adalah terpenuhinya nilai akreditasi A. Sementara itu

sekolah model adalah merupakan sekolah inti yang memiliki beberapa sekolah imbas. Sekolah model dimaksudkan menjadi *center/ point* dalam menyebarkan berbagai kebijakan dan program pembinaan peningkatan kapasitas sekolah.

Output Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP kegiatannya juga mencakup kegiatan pendukung yakni kegiatan pelaksanaan kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum 2013 merupakan contoh penanaman pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yang termaktub dalam nawacita atau lebih populer revolusi mental. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Integrasi pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran berupa penanaman nilai-nilai positif yang tumbuh dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama dan kisah-kisah teladan orang-orang besar. Efektifitas pendidikan karakter sangat bergantung kepada pengembangan kurikulum dalam menunjang proses belajar mengajar dan konsistensi penanaman nilai-nilai tersebut antara guru, orang tua, dan masyarakat.

1.3. Tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur.

- a. Meningkatkan kualitas data Pendidikan Dasar dan Menengah akurat, berkelanjutan dan terbarukan.

Tabel 4.6. Kegiatan pendukung LPMP Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbarukan	%	85	87	89	92	95

Tujuan penyediaan data pokok pendidikan Dasar dan Menengah secara online adalah untuk menjaga integritas data individual, relasional, dan longitudinal. Selain itu untuk meningkatkan kualitas data sehingga ketersediaan data terpenuhi, memperhatikan asas manfaat dan kehandalan data dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga diharapkan dapat mereduksi biaya data antara lain biaya pengumpulan dan pengolahan serta biaya kekeliruan informasi. Selanjutnya pemanfaatan data pokok pendidikan tidak hanya untuk pemberian tunjangan guru, namun program BOS, PIP, dan pembangunan sarana prasarana lainnya secara terintegrasi. Dengan demikian data pokok pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

- b. Nilai minimal LAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur sebesar 80 (baik) pada tahun 2019.

Tabel. 4.7. Kegiatan Pendukung LPMP Kalimantan Timur dalam rangka pemenuhan Tata kelola manajemen yang Handal

No	Kegiatan Pendukung	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Minimal LAKIP LPMP KALTIM sebesar 80 (baik) tahun 2019	72	73	75	78	80

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diharapkan dapat memberikan informasi faktual mengenai akuntabilitas input, proses, output, outcome sampai benefit dan dampak. Sistem akuntabilitas yang baik dapat

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan dan ketidakberhasilan, efektifitas suatu program dan kegiatan. Oleh karena itu LAKIP harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai bisnis proses program dan kegiatan di lingkungan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengukuran yang dilakukan harus memberikan suatu rekomendasi tentang efektivitas program yang dilakukan dan memastikan bahwa program yang telah dilakukan berdampak pada unit layanan terkecil yaitu stake holder pendidikan. Oleh karena itu LAKIP yang baik dapat disusun bilamana semua program dan kegiatan mengikuti kaidah SAKIP secara konsisten.

B. KERANGKA PENDANAAN

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur menyusun rencana startegis tahun 2015 – 2019 mengacu pada struktur organisasi dengan formulasi kegiatan dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah ada dalam program renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan program LPMP KALTIM didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan, dan meningkatkan Kapasitas daerah/staf, pemberdayaan staf LPMP perlu untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah, pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pembinaan terhadap staf LPMP

dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga dapat mengemban tugas baru yang menjadi tanggung jawabnya. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

Tabel.4.8. Kegiatan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2015 – 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemetaan mutu SD	%	90,15	100	100	100	100
2	Pemetaan	%	71,49	100	100	100	100

	mutu SMP						
3	Pemetaan mutu SMA	%	71,49	100	100	100	100
4	Pemetaan mutu SMK	%	59,60	65	80	90	100

. Kegiatan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2015 – 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemetaan mutu SD	%	90,15	100	100	100	100
2	Pemetaan mutu SMP	%	71,49	100	100	100	100
3	Pemetaan mutu SMA	%	71,49	100	100	100	100
4	Pemetaan mutu SMK	%	59,60	65	80	90	100

2. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk seluruh Jenjang Pendidikan.

LPMP Kalimantan Timur memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

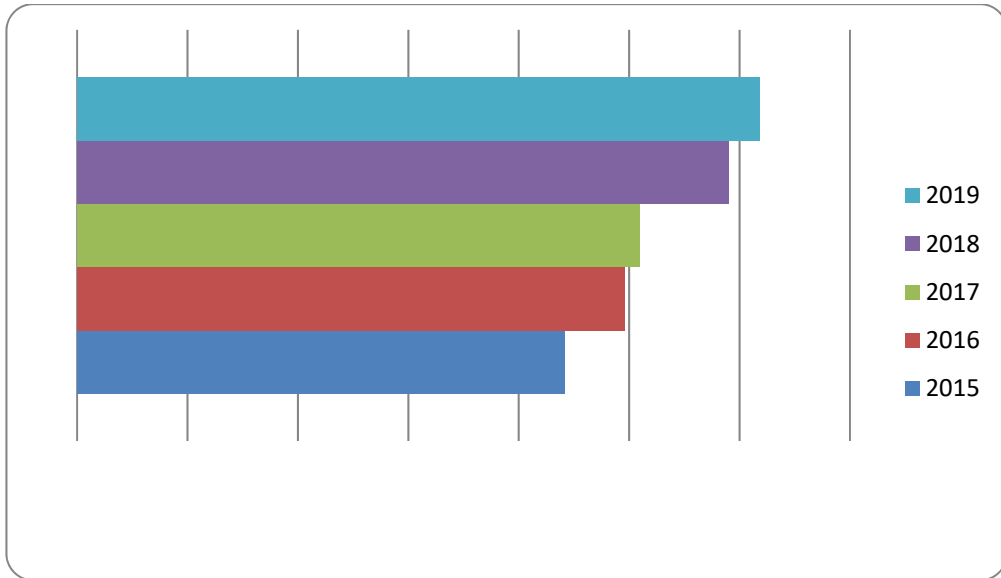
Tabel. 4.9.Target Kinerja Kegiatan LPMP 2015 – 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SD	%	16,8	25	40	60	80
2.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMP	%	16,8	25	40	60	80
3.	Supervisi						

	dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMA	%	16,8	25	40	60	80
4.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMK	%	16,8	25	40	60	80

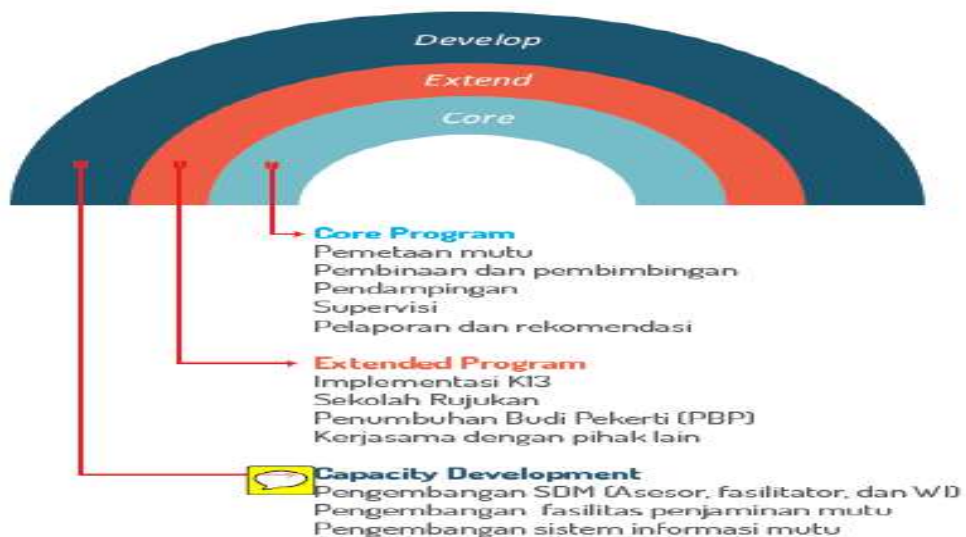
Tabel.4.10. Struktur Kegiatan dan Anggaran Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

No	Kegiatan	Jmh Output	Target Anggaran (Rp.000.000)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	5	375.000	390.000	405.000	420.000	452.300
2	Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan	11	35.100	37.100	39.100	41.100	43.100



Gambar. 4.1. Diagram Proyeksi Anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lingkungan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.(Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2015 – 2019)

Gambar. 4.2. Diagram Core Program, Extended Program dan Capacity Development Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur (Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah)



BAB

5

PENUTUP



Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam program dan kegiatan tahunan bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu tahun 2015 – 2019. Mengacu kepada Rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tema pembangunan pendidikan dalam lima tahun ini adalah meningkatnya daya saing regional, dengan tetap mencari peluang merambah daya saing Internasional, yang dilakukan antara lain dengan keikutsertaan peserta didik dalam kompetisi-kompetisi internasional yang bergengsi.

Di dalam rencana strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran program, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dan kegiatan-kegiatan pendukung yang semuanya bermuara pada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur pada kurun waktu 2015 – 2019. Secara operasional program Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tupoksi LPMP adalah terdiri atas 3 program kegiatan dari 6 program Kegiatan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut adalah program Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan, Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Dukungan Manajemen serta pelaksanaan tugas lainnya.

Pembagian kegiatan ini disertai dengan penetapan anggarannya dan tanggung jawab pengelolaannya. Seluruh kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan harus tetap terarah dan terencana baik dalam mencapai sasaran –sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dalam aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran dengan tetap berusaha untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Renstra 2015 -2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Renstra 2015 – 2019 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Laporan Hasil Pemetaan Mutu LPMP Kalimantan Timur 2016
4. Laporan Hasil Pemetaan Mutu LPMP Kalimantan Timur 2017
5. Data Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

RENCANA REVIUE REVISI 1.2. RENSTRA 2015 – 2019 LPMP KALIMANTAN TIMUR 2019

No	Semula	Menjadi
1.	<p>Visi LPMP KALTIM</p> <p>Membentuk insan dan ekosistem pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter dan berlandas pada asaz gotong royong</p>	<p>Visi LPMP KALTIM</p> <p>Terbentuknya insan dan ekosistem mutu pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur yang berkarakter dengan olah bebaya menjunjung mutu</p>
2	<p>Misi LPMP Kaltim</p> <p>Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat</p>	<p>Misi LPMP KALTIM</p> <p>Mewujudkan perilaku pendidikan dasar dan menengah yang bermutu</p>
	<p>Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan</p>	<p>Peningkatan tata kelola dan efektivitas birokrasi lembaga dan pelibatan publik</p>
	<p>Mewujudkan pembelajaran yang bermutu</p>	<p>Mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kalimantan Timur</p>
	<p>Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa</p>	
	<p>Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik</p>	